



**RILIS KUNJUNGAN SPESIFIK KOMISI V DPR RI
KE TOL BOGOR–CIAWI–SUKABUMI (BOCIMI) PROVINSI JAWA BARAT
TANGGAL: 22 MEI 2024**

Fokus utama Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI kali ini adalah untuk melihat secara langsung permasalahan longsor di kilometer 64 ruas Tol Bocimi dan upaya penanganan yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan Badan Usaha Jalan Tol. Kunjungan ini dipimpin oleh Bapak Roberth Rouw dan diikuti oleh beberapa Anggota Komisi V DPR RI dan didampingi oleh para pejabat dari Kementerian PUPR dan Direksi dari PT Trans Jabar Tol sebagai Badan Usaha yang beroperasi di ruas tol ini.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Tol Bocimi seksi dua (II) ini baru diresmikan Presiden Joko Widodo pada 4 Agustus 2023 atau belum mencapai 1 tahun. Terhadap kejadian longsor KM 64+600 pada jalan tol Ciawi-Sukabumi seksi 2 telah dilakukan penanganan sementara antara lain pemasangan *steel sheet pile* pada lokasi longsor. Terdapat 2 alternatif terhadap penanganan permanen pada jalan tol Bocimi seksi 2 yaitu pemasangan *soldier pile* sepanjang 60 M dengan waktu pemasangan 4 bulan atau pembuatan jembatan 2x25 m dengan waktu pelaksanaan 5 bulan. Saat ini masih dilakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai alternatif penanganan permanen yang akan dilakukan oleh PT. Trans Jabar Tol.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Tim rombongan Komisi V DPR RI menegaskan bahwa pelaksanaan konstruksi pembangunan jalan mestinya wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi jalan sebagaimana amanat Pasal 35E UU No. 2 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Selain itu ditegaskan bahwa dalam pembangunan Jalan Tol, perlu juga mengetahui kelayakan lingkungan melalui studi dampak lingkungan sebelum konstruksi, yang mencakup pengelolaan resiko longsor dan langkah-langkah mitigasi yang harus diambil. Standar teknis dalam desain dan pelaksanaan konstruksi juga harus dipatuhi untuk memastikan ketahanan terhadap bencana alam seperti longsor.

Di sisi lain, pemeliharaan rutin dan pengawasan selama operasional Jalan Tol juga menjadi hal sangat penting untuk dilakukan agar memastikan keamanan dan kelayakan Jalan Tol yang telah dibangun. Kementerian PUPR diharapkan untuk meningkatkan pengawasan pelaksanaan konstruksi pembangunan Tol ini agar terwujudnya pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kriteria dan kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.

Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian PUPR dan Operator Tol Bocimi agar mempercepat penyelesaian penyusunan desain konstruksi dalam rangka penanganan permanen terhadap ruas tol yang longsor tersebut sehingga dapat digunakan oleh masyarakat. Disamping itu diharapkan agar dilakukan pembangunan jembatan atau *box culvert* dalam mengatasi longsor tersebut dengan tetap memperhatikan kualitas dan estetika. Selain itu, Kementerian PUPR diminta untuk mempercepat penyelesaian penghitungan kerugian akibat longsor di ruas Tol Bocimi tersebut

Hal lain yang dibahas dalam Kunjungan Spesifik tersebut adalah agar Kementerian PUPR perlu melakukan audit terhadap infrastruktur yang ada di wilayah rawan gempa, termasuk di wilayah Jawa Barat untuk menghindari kecelakaan dan kerusakan infrastruktur. Ke depan diharapkan agar perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Jalan Tol harus benar-benar diperhatikan baik terkait kualitas maupun hal-hal teknis lainnya untuk mendukung pelayanan jalan yang lancar, aman dan nyaman.

Sukabumi, 22 Mei 2024

Tim Kunker Spesifik ke Tol Bocimi